

Polemik Pembatasan dan Larangan Ekspor Global di Masa Pandemi COVID-19

Kathleen Mintarja¹, Richard Theo Parulian², Stella Claresta Alexander³

¹Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, kathleenminn@gmail.com

²Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, richardtheo@yahoo.com

³Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, stellaclaresta@ymail.com

ABSTRACT

Since December 2019, COVID-19 has been the world's hottest course of discussion because of its destructive impacts towards human survival in all aspects, both directly and indirectly. As the actor with the highest power, state governments have implemented various policies that are expected to suppress the spread of coronavirus and therefore, ensure the safety as well as the welfare of all people; one of them is through export prohibitions and restrictions on foodstuffs. However, these varied policies are slowly considered to bring unsettling impacts toward importing countries as well as regions, such as Africa, who are still struggling with food security even before the pandemic occurs. Hence, this research raises the research question of: "How is the export ban policies on foodstuffs implemented and its impact on the dynamics of the global economy?". In analyzing, the researchers utilize the theory of dependency, concept of national interest, and trade protectionism policies. Based on the literature study conducted through qualitative methods, the research shows that while a number of export countries achieved food self-sufficiency, there are rising disruptions and risks to the global food supply chain and economic growth. In the end, state governments are expected to start focusing on finding alternative long-term policies that are able to benefit more parties.

Keywords: COVID-19, Export Prohibitions and Restrictions on Foodstuffs, Dependency Theory, National Interest, Trade Protectionism.

ABSTRAK

Sejak Desember 2019, COVID-19 telah menjadi pokok pembahasan dunia akibat dampaknya yang sangat destruktif bagi keberlangsungan hidup manusia dalam segala aspek, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai aktor dengan kekuasaan tertinggi, pemerintah negara telah menerapkan berbagai macam kebijakan yang diharapkan mampu menekan potensi merebaknya virus corona dan menjamin keamanan serta kesejahteraan masyarakat; salah satunya adalah pembatasan dan larangan ekspor untuk bahan pangan. Akan tetapi, kebijakan yang bervariasi ini mulai dianggap meresahkan, oleh karena dampaknya bagi negara pengimpor dan juga kawasan, seperti Afrika, yang masih bergumul dengan isu ketahanan pangan bahkan sejak sebelum pandemi terjadi. Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk mengangkat rumusan masalah: "Bagaimana kebijakan larangan ekspor bahan pangan diterapkan dan dampaknya terhadap dinamika perekonomian global?". Dalam menganalisis, peneliti menggunakan teori dependensi, konsep kepentingan nasional, dan kebijakan proteksionisme perdagangan sebagai landasan berpikir. Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan secara kualitatif, penelitian menunjukkan bahwa di balik kemandirian pangan yang berhasil dicapai sejumlah negara ekspor, terdapat gangguan dan risiko yang besar bagi rantai pasok pangan global dan pertumbuhan perekonomian global. Pada akhirnya, negara diharapkan untuk mulai berfokus dalam menemukan kebijakan alternatif jangka panjang yang mampu menguntungkan lebih banyak pihak.

Kata Kunci: COVID-19, Pembatasan dan Larangan Ekspor Bahan Pangan, Teori Dependensi, Kepentingan Nasional, Proteksionisme, Perdagangan.

Pendahuluan

Selama satu tahun terakhir, COVID-19 telah berkembang menjadi sebuah isu yang tidak lepas dari sorotan pemerintah, media, dan komunitas global. COVID-19 kerap menjadi pusat pemikiran dan perdebatan dalam diskusi keseharian masyarakat hingga pimpinan negara bahkan dunia, akibat konsekuensinya yang mengubah kondisi, tatanan, dan cara hidup masyarakat global secara drastis dan mendadak. Selain itu, kompleksitas isu COVID-19 dalam berbagai macam sektor, seperti kesehatan, sosial-budaya, ekonomi, politik, hingga pendidikan, juga memaksa pemerintah negara untuk mengalihkan fokus dan rancangan kebijakannya agar semakin adaptif dalam menghadapi COVID-19.

Secara umum, virus *novel coronavirus* atau SARS-CoV-2 (sebelumnya 2019-nCoV) ini dikenal sebagai varian dari virus corona yang juga sempat menjadi sebab terjadinya wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) pada tahun 2002/2003. Adapun penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-Cov-2 ini dinamakan sebagai *Coronavirus Disease* atau COVID-19, yang pada 11 Maret 2020 ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) sebagai sebuah pandemi global.¹ Walaupun asal-muasal dari persebaran virus ini mustahil untuk dilacak, para peneliti menemukan bahwa kasus pertama muncul dari Tiongkok, tepatnya di Wuhan Huanan Haixian Pifa Shichang, sebuah pasar grosir makanan yang terletak di Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Hipotesis ini didukung oleh banyaknya sampel lingkungan yang diambil dari pasar tersebut yang dinyatakan positif terjangkit virus corona.

Selain itu, banyak pasien awal yang terduga positif merupakan pemilik kios pasar, karyawan, atau pengunjung tetap dari pasar tersebut. Alhasil pada Januari 2020, pemerintah Tiongkok pun menutup secara sementara operasionalisasi dari pasar Wuhan Huanan Haixian Pifa Shichang.²

Kondisi ini pun akhirnya meningkatkan kekhawatiran terhadap krisis kesehatan global dan mendorong pemerintah di setiap negara untuk meningkatkan standar keamanan nasional dan mengadopsi sejumlah kebijakan baru. Pada masa awal pandemi, kebijakan ini dimulai dengan menerapkan mekanisme *lockdown*, seperti dengan menutup bisnis, melarang bepergian, menerapkan *physical/social distancing*, hingga menutup batas-batas negara. Secara spesifik, pemerintah juga melakukan perubahan terhadap aturan kebersihan pengolahan bahan pangan seperti yang diatur dalam *Global Food Safety Initiative*, *Safe Quality Food*, dan *Brand Reputation Compliance*. Aturan-aturan ini dibuat guna memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok makanan global, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi, menerapkan inisiatif jaga jarak dan protokol kesehatan COVID-19.³

Dari sekian banyaknya regulasi yang telah diberlakukan, pembatasan dan larangan perdagangan untuk bahan pangan menjadi salah satu kebijakan yang paling krusial dan sensitif, oleh karena 3 (tiga) hal.

¹ Jamie Ducharme, "World Health Organization Declares COVID-19 a 'Pandemic.' Here's What That Means," *TIME*, 11 Maret 2020, <https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/> (Diakses 20 September 2020).

² "Wuhan market had role in virus outbreak, but more research needed, WHO says," *CNBC*, 8 Mei 2020, <https://www.cnbc.com/2020/05/08/who-wuhan-market-had-role-in-coronavirus-outbreak-more-research-needed.html> (Diakses 22 September 2020).

³ Alvaro Espitia, Nadia Rocha, Michele Ruta, "COVID-19 and Food Protectionism: The Impact of the Pandemic and Export Restrictions on World Food Markets," *World Bank*, Mei 2020, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33800/COVID-19-and-Food-Protectionism-The-Impact-of-the-Pandemic-and-Export-Restrictions-on-World-Food-Markets.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Diakses 26 September 2020).

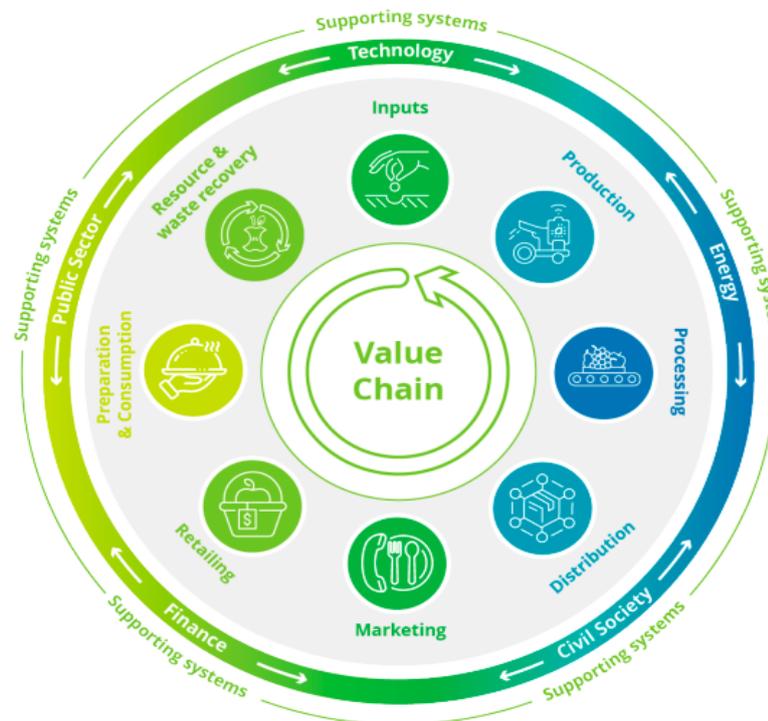
Pertama, industri pangan terdiri atas banyak aktor dengan jaringan proses yang kompleks, sehingga memerlukan pemetaan yang terarah bagi dampaknya terhadap masing-masing pihak. [Lihat Figur 1].

Kedua, sistem pangan global juga memiliki nilai sebesar US\$ 8 triliun atau yang setara dengan sekitar 10% dari PDB global, sehingga aturan terkait perdagangan bahan pangan akan sangat memengaruhi dinamika perekonomian global kedepannya.⁴

Terakhir, lebih dari 3 (tiga) miliar orang di dunia sangatlah bergantung pada perdagangan internasional untuk menyokong ketahanan pangan domestik, sehingga kesejahteraan masyarakat pun menjadi variabel yang sangatlah krusial.⁵

Figur 1. Aktor dalam Sistem Pangan Global

Sumber: Deloitte 2020



Kebijakan ini biasanya dilakukan oleh suatu negara untuk memitigasi terjadinya kurangnya persediaan suatu barang dalam skala domestik. Pada dasarnya, menurut *General Agreement on Trade and Tariffs* (GATT) 1994 yang diatur oleh *World Trade Organization* (WTO) Artikel XI:1, negara anggota dilarang untuk memperkenalkan atau mempertahankan segala bentuk larangan atau pembatasan ekspor selain bea cukai, pajak, atau biaya lainnya. Akan tetapi, aturan inipun memiliki

⁴ “A shock to the food system: Lessons Learned from the COVID-19 pandemic,” *Deloitte*, <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/br/Documents/consumer-business/Deloitte-Covid-19-shock-to-the-food-system.pdf>, hal. 4. (Diakses 24 September 2020).

⁵ “COVID-19 and Export Restrictions: the Limits of International Trade Law and Lessons for the AfCFTA,” United Nations Economic Commission for Africa, https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/atpc_brief-covid-19_export_restrictions-legal-analysis_eng_final1.pdf, hal. 3.

pegecualian, sebab pada GATT Artikel XI:2 (a), negara pengeksport diperbolehkan untuk melakukan larangan atau pembatasan ekspor secara sementara, demi mencegah atau meredakan kondisi kekurangan persediaan bahan makanan atau produk lainnya yang krusial.⁶ Terutama dalam masa pandemi COVID-19, karena kekurangan jumlah tenaga kerja sangat mungkin terjadi akibat terkena penyakit ataupun dilarang bekerja untuk menekan potensi persebaran virus. Adapun WTO juga mensyaratkan anggota negara untuk tetap mempertimbangkan efeknya terhadap keamanan pangan bagi negara pengimpor.⁷

Menurut data dari *World Trade Organization* (WTO), per 22 April 2020, 80 negara telah melaporkan implementasi 92 jenis larangan atau pembatasan ekspor di negaranya masing-masing, di mana 17 negara di antaranya juga melakukan pembatasan ekspor terhadap bahan pangan.⁸ Beberapa diantara negara-negara tersebut merupakan eksportir dan produsen bahan pangan yang sangatlah penting, seperti gandum dan beras. Padahal, gandum dan beras memiliki kontribusi sebesar 40% dari total kebutuhan kalori global. Selain itu, produk-produk seperti lemon, telur, tepung, bawang, keju, dan lain-lain, juga ikut terkena imbasnya.⁹

Pada satu sisi, keputusan ini cenderung positif karena merupakan bentuk pengutamakan kebutuhan dalam negeri bagi negara-negara pengeksport. Dengan demikian, pemerintah dapat mencegah adanya kenaikan harga dan kekurangan persediaan di pasar domestik. Akan tetapi, pembatasan perdagangan ini juga menciptakan dampak negatif karena menandakan adanya upaya untuk mengurangi ketersediaan bahan di pasar global, sehingga menciptakan efek domino, seperti *panic buying* dan kompetisi harga yang lebih mahal. Terutama bagi konsumen berpenghasilan rendah dari negara-negara pengimpor yang akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kebijakan pembatasan perdagangan ini tentu akan terus memunculkan ketegangan perdagangan (*trade tension*) bagi sejumlah negara karena banyak negara yang mulai mengalami resesi ekonomi.

Kondisi ini akhirnya memengaruhi dinamika perekonomian global karena diproyeksikan akan menurun secara drastis menjadi -3%. Selain itu, tingginya pembiayaan COVID-19 juga mendorong lebih dari 85 negara untuk mengajukan bantuan dana darurat kepada IMF.¹⁰ Menurut pernyataan salah satu representatif *World Food Security High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition*, saat ini regulasi ekspor-impor telah berimbas pada persediaan dan permintaan bahan pangan dan kapasitas memproduksi serta mendistribusikan makanan. Hal ini tentu saja akan berimbas negatif terhadap persediaan pangan global. Namun, ada beberapa golongan yang akan mengalami kerugian lebih besar diantaranya adalah negara yang dalam kesehariannya bergantung pada impor dan negara dengan pendapatan ekonomi rendah, seperti Afrika. *World Bank* memprediksi bahwa kinerja ekspor global selama pandemi COVID-19 diprediksi akan menurun sebanyak 12.7%, salah satunya akibat pembatasan ekspor tersebut. Jika kondisi ini terus berlangsung maka krisis pangan global dapat terjadi,

⁶ "Export Prohibitions and Restrictions: Information Note," *World Trade Organization*, 23 April 2020, https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/export_prohibitions_report_e.pdf (Diakses 26 September 2020).

⁷ "Export Restrictions in Response to the COVID-19 Pandemic," *Congressional Research Service*, 25 Agustus 2020, <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11551> (Diakses 28 September 2020).

⁸ "Export Controls and Export Bans over the Course of the Covid-19 Pandemic," *WTO*, 29 April 2020, https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/bdi_covid19_e.pdf (Diakses 29 September 2020).

⁹ Jonathan Hepburn, David Laborde, Marie Parent, dan Carin Smaller, "COVID-19 and Food Export Restrictions: Comparing today's situation to the 2007/08 price spikes," *International Institute for Sustainable Development*, <https://www.iisd.org/system/files/2020-08/COVID-19-food-export-restrictions.pdf> (Diakses 29 September 2020).

¹⁰ Taarek Refaat, "Some 85 Countries Request IMF's Assistance to Battle Pandemic," *See*, 1 April 2020, <https://see.news/some-85-countries-request-imfs-assistance-to-battle-pandemic/> (Diakses 29 September 2020).

menandakan kegagalan pemerintah dalam mencapai target-target dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dengan mengangkat pertanyaan penelitian: “Bagaimana kebijakan larangan ekspor bahan pangan diterapkan dan dampaknya terhadap dinamika perekonomian global?”, penulis berpendapat bahwa kebijakan pembatasan dan larangan ekspor akan merusak dinamika perekonomian kawasan Afrika dan global, jika tetap diberlakukan sampai akhir pandemi COVID-19. Sebagai alternatif, pemerintah negara harus segera mencari kebijakan dagang yang terbuka. Dalam menganalisis, para peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif dan didukung dengan teknik pengumpulan data secara studi pustaka.

Kerangka Pemikiran

Konsep Kepentingan Nasional Menurut Realisme

Kepentingan nasional merupakan salah satu bentuk turunan dari *grand theory* realisme, aliran teori yang menjelaskan Hubungan Internasional dari sisi pandang kekuasaan negara, sifat kompetitif dan konfliktual dalam politik internasional, serta bagaimana kepentingan nasional sebuah negara menjadi dasar formulasi utama dari pembuatan kebijakan politik luar negeri. Konsep ini sangatlah krusial, mengingat setiap aktivitas dan kebijakan pemerintah pasti akan selalu disesuaikan kepada kepentingan nasionalnya masing-masing. Kepentingan nasional menunjukkan aspirasi negara-negara yang diaplikasikan melalui pembuatan program dan kebijakan, baik dalam ranah domestik maupun internasional.¹¹

Salah satu pencetus konsep kepentingan nasional adalah Hans J. Morgenthau dalam bukunya yang berjudul *Politics Among Nations*. Menurut Morgenthau, kepentingan nasional merupakan kondisi permanen yang memberi para pembuat kebijakan petunjuk rasional dalam menjalankan tugasnya. Kepentingan nasional juga biasanya didefinisikan sebagai strategi dan kapabilitas ekonomi karena politik internasional merupakan suatu *struggle for power* antarnegara.¹² Maka dari itu, seluruh usaha untuk mendapatkan, mempertahankan, dan ekspansi kekuatan adalah justifikasi negara melindungi kepentingan nasional mereka.¹³ Selain itu, Morgenthau juga mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional adalah cerminan dari keputusan yang diambil oleh negara, sehingga konsep kepentingan nasional akan memberi pengaruh besar dalam pembuatan dan implementasi strategi suatu negara.¹⁴ Oleh sebab itu, analisis terhadap kepentingan nasional dapat menjelaskan perilaku suatu negara dalam dunia internasional.¹⁵

Pembahasan Morgenthau mengenai konsep kepentingan nasional juga dimuat di dalam tulisannya yang berjudul *Another 'Great Debate': The National Interest of the United States*. Menurut Morgenthau, ada tujuan yang diakui sebagai kepentingan fundamental secara global. Tujuan yang dimaksud seringkali disebut sebagai tujuan vital bagi negara, dimana negara akan melakukan apapun demi mencapai tujuan fundamentalnya. Selain itu, tujuan fundamental juga menjadi sesuatu yang bersifat primer dan membawahi aspek-aspek kepentingan nasional lain. Salah satu contoh tujuan yang bersifat vital bagi negara adalah mewujudkan keamanan negara serta memberikan perlindungan bagi

¹¹ J Frankel, 1979, *International Relations in a Changing World* (Oxford, 1979), hal. 86.

¹² Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory*, (New York: Palgrave Macmillan), 35-36.

¹³ Hans J. Morgenthau, 2006, *Politics Among Nations* (New York: Alfred A. Knopf) hal. 145.

¹⁴ Zongyi Liu, 2014, "The Concept of National Interests," *China's Diplomacy*, hal. 121-189.

¹⁵ J. Frankel, 1979, *International Relations in a Changing World* (Oxford), hal. 85.

warga, nilai-nilai, dan budaya negara tersebut.¹⁶ Selain itu, Morgenthau juga berpendapat bahwa ada dua faktor yang mendasari konsep kepentingan nasional. Faktor pertama adalah permintaan atau kebutuhan rasional, sedangkan faktor kedua adalah kepentingan nasional yang bergantung pada situasi. Alasan pembagian ini dilakukan adalah sebagai subjek politik utama, negara tidak luput dari perubahan zaman. Hal ini membuat hubungan antara kepentingan dan negara bersifat dinamis dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam dunia internasional.¹⁷

Selain Morgenthau, konsep kepentingan nasional juga dicetuskan oleh Jack C. Plano dan Ray Olton. Menurut Plano dan Olton, kepentingan nasional adalah tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan (*decision-maker*) dalam merumuskan politik luar negeri. Selain itu, Plano dan Olton juga berpendapat bahwa setiap tindakan dari suatu negara adalah bentuk dari kebijakan luar negeri yang menetapkan kepentingan vital ini sebagai kebutuhan utama yang harus dipenuhi. Konsep kepentingan nasional ini berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup (*survival*), kemerdekaan dan kedaulatan negara, keamanan militer, politik dan ekonomi.¹⁸ Kepentingan nasional diartikan sebagai kepentingan vital suatu bangsa yang harus diperjuangkan demi kelangsungan hidupnya. Kepentingan vital yang dimaksud oleh Plano dan Olton terdiri atas 5 indikator utama, yaitu:¹⁹

1. *Self Preservation*, yaitu hak untuk mempertahankan eksistensi diri. Adanya kepentingan bagi suatu negara untuk memastikan kelangsungan hidupnya dari ancaman apapun yang dapat merugikan negara. Konsep pertahanan diri tidak hanya didasarkan pada kondisi geografis, namun berkaitan dengan kekuasaan hegemoni suatu negara terhadap negara lain.
2. *Independence*, yaitu adanya kedaulatan suatu negara untuk mengatur rumah tangga negara baik ke dalam maupun ke luar, militer, dan ekonomi tanpa campur tangan dan tunduk kepada negara lain.
3. *Military Security*, keamanan suatu negara dinilai dengan kekuatan militer untuk menjaga dan mempertahankan keamanan teritorial dari ancaman negara lain.
4. *Territory Integrity*, kepentingan nasional suatu negara untuk mengamankan teritorial dan sumber daya yang dimilikinya.
5. *Economic Well Being*, memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Negara memiliki kepentingan nasional yang berkaitan dengan usaha untuk mempertahankan dan melindungi sektor ekonominya.

Kebijakan Proteksionisme Perdagangan

Sama seperti COVID-19 yang telah menyebar ke seluruh dunia, begitu pula tindakan proteksionis. Pemerintah di berbagai benua telah memberlakukan sejumlah tindakan yang diduga melindungi ekonomi dan sistem kesehatan mereka dari kerusakan akibat pandemi. Menurut Associate

¹⁶ Hans J. Morgenthau, 1952, "Another 'Great Debate': The National Interest of the United States." *The American Political Science Review*, XLVI, hal. 972.

¹⁷ Ken Kiyono, "A Study on the Concept of The National Interest of Hans J. Morgenthau: As The Standard of American Foreign Policy." http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1/keieikeizai49_03_04.pdf (Diakses 14 Agustus 2019).

¹⁸ Lihat di Jack C. Plano dan Ray Olton, *The International Relations Dictionary*, Third Edition, (California: AB-Clio, 1980), 27.

¹⁹ *Ibid.*

Peneliti Ekonomi, Muhammad Zulfikar Rakhmat, dari Indef, ia memperkirakan pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini akan membawa dunia kembali ke era proteksionisme.²⁰

Secara umum, proteksionisme dapat didefinisikan sebagai bentuk kebijakan yang secara sengaja dibuat oleh pemerintah suatu negara untuk melindungi produsen domestik akan persaingan dari luar.²¹ Di tengah perdagangan dunia yang saat ini berkembang ke arah liberalisasi pun proteksionisme masih muncul sebagai pilihan kebijakan perdagangan. Proteksionisme juga terbagi menjadi dua yaitu *old protectionism* dan *new protectionism*. *Old protectionism* merupakan penerapan instrumen hambatan perdagangan internasional dalam bentuk tarif dan kuota impor. Akan tetapi, sejak mulai terjadinya liberalisasi perdagangan dunia pasca-Perang Dunia II, definisi dan tindakan proteksionisme mulai bergeser dan muncul tren penerapan hambatan perdagangan non-tarif yang dikenal sebagai *new protectionism*. Proteksionisme ini merupakan bentuk hambatan dengan instrumen yang cenderung lebih transparan dan berbeda dari *old protectionism*.²²

Philip I Levy dalam *Imaginative Obstruction: Modern Protectionism in the Global Economy* menempatkan intensi (*intent*) sebagai kunci penting yang perlu diidentifikasi dalam mendefinisikan kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh negara. Levy mengklasifikasikan proteksionisme dilihat dari sifat kebijakannya yang transparan atau implisit dan bentuk instrumen kebijakan yang digunakan. Tiga kategori dalam pendefinisian proteksionisme yang dirumuskan oleh Levy adalah sebagai berikut:²³

Pertama, *intentional protectionism*. Ini merupakan bentuk proteksionisme yang paling transparan dengan rumusan kebijakan yang secara eksplisit berpihak kepada industri domestik daripada impor asing. Instrumen kebijakan yang dipakai adalah instrumen yang dikenal dengan umum berupa penerapan tarif impor, subsidi ekspor, dan kuota. Walaupun sudah mengalami pengurangan yang sangat drastis sejak menguatnya liberalisasi perdagangan di tingkat global, jenis proteksionisme ini masih lazim diterapkan di negara-negara berkembang untuk komoditas manufaktur dan hampir di semua negara untuk produk pertanian.

Kategori proteksionisme yang kedua menurut Philip I Levy adalah *incidental protectionism*, yang merupakan bentuk proteksionisme yang memberikan dampak yang hampir sama dengan *intentional protectionism* tetapi bekerja secara tidak langsung. Secara kebijakan, bentuk proteksionisme ini tidak terlihat secara eksplisit mendiskriminasi produk luar negeri atas produk yang berasal dari produsen domestik. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang memiliki legitimasi kuat sebagai persyaratan atas produk luar yang akan masuk ke pasar domestik. Proteksionisme jenis ini bekerja secara tidak langsung dengan memasukkan unsur non-perdagangan kedalam persyaratan impor produk seperti penerapan standar kesehatan dan keamanan.

Ketiga, *instrumental protectionism*. Bentuk proteksionisme ini merupakan bentuk yang paling tidak transparan dan diterapkan dengan menggunakan kebijakan perdagangan sebagai alat untuk mendorong perubahan kebijakan politik di negara lain. Jika gertakan yang diberikan berhasil dalam mengubah kebijakan negara lain, maka kebijakan proteksionisme tidak jadi diterapkan,

²⁰ Aji Cakti, "Indef: Covid-19 bisa mendorong negara-negara ke era proteksionisme," *Antaranews*, 8 April 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1412142/indef-COVID-19-bisa-mendorong-negara-negara-ke-era-proteksionisme> (Diakses 30 September 2020).

²¹ Graham Dunkley, *Free Trade : Myth, Reality, and Alternatives* (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 3.

²² Dominick Salvatore, "Protectionism and World Welfare: Introduction," dalam *Protectionism and World Welfare*, ed. Dominick Salvatore (Cambridge : Cambridge University Press., 2003), 2.

²³ 9 Philip I Levy, "Imaginative Obstruction: Modern Protectionism in the Global Economy," *Georgetown Journal of International Affairs*, 2009, Summer/Fall: 7-14.

walaupun pastinya berpengaruh terhadap hubungan politik antar negara tersebut. Akan tetapi, jika tidak ada perubahan politik maka akan diterapkan bentuk proteksi perdagangan sebagai konsekuensi ancaman.

Teori Dependensi dalam Hubungan Internasional

Dalam menganalisis dinamika negara dalam Hubungan Internasional, salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah teori dependensi. Teori ini pertama kali muncul pada akhir tahun 1950 oleh ahli ekonomi dari Argentina, Raul Prebisch. Awalnya, Prebisch berpendapat bahwa negara-negara miskin mengeksport komoditas utama kepada negara-negara maju, yang kemudian mengolah produk tersebut dan dijual kembali kepada negara-negara miskin. Oleh sebab itu, negara-negara miskin tidak akan memperoleh pendapatan yang lebih besar dari ekspor mereka untuk membayar impor.²⁴

Meskipun ada banyak perdebatan terkait definisi dari teori dependensi, ada beberapa inti preposisi yang menjadi basis dalam analisis teori dependensi. Pertama, dependensi membagi negara-negara dalam sistem internasional menjadi dua, yaitu negara dominan dan dependen. Negara-negara dominan dideskripsikan sebagai negara maju menurut OECD, sedangkan negara dependen adalah negara-negara dengan pendapatan per kapita rendah dan bergantung pada ekspor satu jenis komoditas saja. Kedua, teori dependensi menganggap bahwa kekuatan eksternal memiliki pengaruh terhadap aktivitas ekonomi dalam sebuah negara dependen. Kekuatan eksternal dapat berupa perusahaan multinasional, pasar komoditas internasional, dan bentuk-bentuk lain yang dapat dimanfaatkan oleh negara dominan untuk merepresentasikan tujuan ekonomi mereka di negara lain. Terakhir, teori dependensi mengindikasikan bahwa hubungan antara negara dominan dan dependen bersifat dinamis. Hal ini disebabkan oleh ketimpangan kekuatan serta latar belakang sejarah yang dimiliki oleh kedua negara.

Berangkat dari ketiga inti teori dependensi, maka ada beberapa asumsi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses perkembangan negara-negara miskin. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan, salah satu contohnya adalah strategi ekspor/impor. Menurut teori dependensi, kesuksesan yang diraih oleh negara-negara maju/dominan tidak dapat digunakan sebagai model universal terutama bagi negara-negara miskin/dependen. Hal ini disebabkan oleh model tersebut tidak memperhitungkan hubungan eksploitatif dan kekuatan negara-negara Eropa. Oleh sebab itu, negara-negara dependen harus berupaya untuk menyusun kebijakan yang bersifat *self-reliance*, yakni kebijakan yang hanya ditujukan untuk meningkatkan keadaan sosial dan ekonomi masing-masing.²⁵

Analisis

A. Kebijakan Pembatasan dan Larangan Ekspor sebagai Bentuk *Self-Sufficiency*

Seiring dengan maraknya pandemi COVID-19, dunia ikut menyaksikan kembalinya kepentingan nasional sebagai prioritas utama masing-masing negara dalam panggung internasional. Apabila dianalisis menggunakan konsep kepentingan nasional milik Morgenthau, pandemi COVID-19 merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara. Oleh sebab itu, negara bertanggung

²⁴ Dependency theory, *Economics Online*, https://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Dependency_theory.html (Diakses 30 November 2020).

²⁵ Vincent Ferraro, "Dependency Theory: An Introduction," in *The Development Economics Reader*, ed. Giorgio Secondi (London: Routledge, 2008), hlm. 58-64.

jawab untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Ada dua faktor yang mendasari kepentingan nasional selama pandemi COVID-19. Pertama, permintaan atau kebutuhan rasional. Persebaran virus yang cepat dan vaksin yang belum ditemukan menuntut negara-negara untuk melakukan manajemen krisis dengan cara yang dianggap paling efektif dalam mencegah virus COVID-19 menyebar di wilayah mereka. Faktor kedua adalah kepentingan nasional yang bergantung pada situasi. Sebelum pandemi COVID-19 muncul, dunia internasional telah terbiasa dengan fenomena globalisasi yang dianggap mengaburkan batas-batas negara dan menciptakan interdependensi. Sayangnya, kini konsep tersebut harus mengalami recaliberasi akibat banyak negara yang memilih untuk menutup diri demi mencegah masuknya virus COVID-19.

Di tengah kepanikan yang dialami oleh negara-negara, peran badan internasional pun menjadi kurang relevan akibat dua hal. Pertama, kurangnya arahan yang dapat diterapkan secara universal oleh seluruh negara anggota organisasi internasional. Keadaan ini kemudian dibarengi dengan situasi dan kondisi setiap negara yang berbeda satu dari lainnya, contohnya dari segi ekonomi. Situasi ini merupakan salah satu faktor utama penentu respon negara terhadap pandemi COVID-19. Kedua faktor tersebut membuat negara-negara sulit untuk mengadakan kerja sama internasional dalam menangani COVID-19. Pada akhirnya, sukses atau tidaknya upaya suatu negara dalam mencegah persebaran pandemi ditentukan oleh kompetensi nasional masing-masing.

Pemikiran Morgenthau kemudian didukung oleh Plano dan Olton. Menurut Plano dan Olton, kepentingan nasional adalah kepentingan vital suatu bangsa yang harus diperjuangkan demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kepentingan tersebut dibagi menjadi 5 indikator utama. Akan ada dua indikator yang digunakan dalam menganalisis kepentingan nasional negara-negara selama pandemi COVID-19. Indikator pertama yakni *self-preservation*. Selama pandemi COVID-19, setiap tindakan yang diambil oleh negara adalah bentuk dari upaya negara tersebut untuk mempertahankan eksistensinya. Salah satu bentuk respon pemerintah pada awal pandemi COVID-19 adalah memulangkan warga negara mereka yang berada di luar negeri, serta menutup negara dari kunjungan warga asing. Hal tersebut diwujudkan dengan larangan untuk penerbangan dalam maupun luar negeri. Ditambah lagi, banyak kota-kota besar yang memberlakukan mekanisme *lockdown* demi mencegah persebaran virus COVID-19.²⁶ Kemudian, indikator kelima yakni *Economic Well-Being*. Salah satu bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya adalah dengan menciptakan kesejahteraan ekonomi nasional, sehingga negara akan melakukan segala cara demi melindungi keberlangsungan sektor ekonomi.

Krisis ekonomi dan kesehatan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 membuat negara-negara yang awalnya menjunjung prinsip pasar bebas mengeluarkan ratusan ribu triliun subsidi untuk meningkatkan pertahanan mereka dari perusahaan asing.²⁷ Selain itu, negara-negara berkembang termasuk Jepang, Australia, Jerman, Perancis, dan Italia juga memperketat investasi asing akibat rasa takut terhadap pandemi COVID-19. *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) memperkirakan bahwa investasi asing akan menurun sebesar 30% dibandingkan dengan tahun lalu akibat pandemi ini. Langkah ini diambil oleh negara-negara atas dasar pertimbangan bahwa selama pandemi COVID-19, negara harus menjadikan sektor ekonomi dalam negeri sebagai prioritas utama.

²⁶ "Europe lockdown: New coronavirus rules country-by-country," *BBC News*, 10 Oktober 2020, <https://www.bbc.com/news/explainers-53640249> (Diakses 10 Oktober 2020).

²⁷ Valentina Pop, "Protectionism Spreads Globally With the New Coronavirus," *WSJ*, 29 Mei 2020, <https://www.wsj.com/articles/protectionism-spreads-globally-with-the-new-coronavirus-11590779442> (Diakses 1 Oktober 2020).

Upaya negara-negara yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari proteksionisme. Menurut Graham Dunkley, proteksionisme adalah bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara untuk melindungi produsen domestik akan persaingan dari luar.²⁸ Selain membatasi investasi asing, proteksionisme juga dapat dilakukan dengan cara menerapkan pembatasan atau larangan ekspor. Saat ini, banyak negara yang gencar dalam menerapkan pembatasan atau larangan ekspor terhadap sumber daya yang dianggap penting akibat kekhawatiran pandemi COVID-19. Sekretariat WTO telah mempublikasikan daftar kebijakan terkait perdagangan yang diterapkan oleh negara-negara selama pandemi COVID-19. Menariknya, kebijakan perdagangan yang paling umum dilakukan negara menurut isi daftar kebijakan tersebut adalah pembatasan atau larangan ekspor, serta suspensi sementara bagi syarat dan ketentuan impor.²⁹ Ada sekitar 69 negara yang menerapkan larangan ekspor terhadap setidaknya satu produk, dimulai dari bahan pangan hingga alat kesehatan.³⁰ Hal ini menunjukkan bahwa di tengah pandemi COVID-19, pernyataan “ekspor itu buruk dan impor itu baik” tidak selalu berlaku.

Uni Eropa, organisasi yang selama ini digadang sebagai badan supranasional paling sukses dalam sejarah, dapat menjadi contoh bagaimana ketika dipertemukan dengan situasi tidak terencana, kepentingan nasional menjadi prioritas utama setiap negara. Pada awal masa pandemi COVID-19 di wilayah Eropa, beberapa negara Uni Eropa menerapkan larangan atau batasan ekspor persediaan alat kesehatan ke sesama negara anggota yang membutuhkan. Contoh negara yang menerapkan larangan tersebut adalah Jerman dan Prancis. Keputusan ini diambil oleh satuan darurat pemerintah untuk menghindari kekurangan APD dalam perlombaan melawan virus COVID-19.³¹ Hal ini tentu saja berlawanan dengan konsep pasar tunggal yang selama ini dibanggakan oleh Uni Eropa. Tidak hanya Uni Eropa, pembatasan atau larangan ekspor alat-alat kesehatan juga dilakukan oleh banyak negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan lain-lain.³² Apabila dianalisis menggunakan konsep kepentingan nasional, aktivitas larangan atau pembatasan ekspor adalah bentuk upaya negara dalam melindungi kepentingan nasional mereka, yaitu memastikan bahwa pasokan masker dan alat kesehatan untuk negara mereka tercukupi selama pandemi.

Keadaan yang sama dapat ditemui pada kasus ekspor-impor bahan makanan selama pandemi COVID-19. Keputusan beberapa negara untuk melakukan pembatasan atau larangan ekspor untuk bahan-bahan makanan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh negara dengan landasan kepentingan nasional. Bagi negara eksportir, salah satu tujuan utama dalam melakukan pembatasan ekspor adalah memastikan bahwa negara mereka memiliki persediaan pangan yang cukup, terutama selama masa pandemi. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan adanya penurunan produktivitas dalam rantai pasokan makanan. Kewajiban untuk mengikuti prosedur *social distancing* dan protokol kesehatan lain menuntut pekerja untuk menjaga jarak, sehingga secara otomatis jumlah pekerja yang diperbolehkan dalam satu ruangan mengalami penurunan. Ditambah lagi, banyak pabrik pengolahan makanan yang terpaksa harus ditutup akibat

²⁸ Graham Dunkley, *Free Trade : Myth, Reality, and Alternatives* (New York: Palgrave Macmillan, 2004), 3.

²⁹ Michelle Limenta, “Rising export protectionism in time of global isolation,” *The Jakarta Post*, 28 April 2020, <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/04/28/rising-export-protectionism-in-time-of-global-isolation.html> (Diakses 1 Oktober 2020).

³⁰ “Trade Interdependencies in COVID-19 Goods,” *OECD*, 5 Mei 2020, <https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/trade-interdependencies-in-covid-19-goods-79aaa1d6/> (Diakses 1 Oktober 2020).

³¹ “Germany bans export of medical protection gear due to coronavirus,” *Reuters*, 4 Maret 2020, <https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-germany-exports-idUSL8N2AX3D9> (Diakses 1 Oktober 2020).

³² “Export Controls and Export Bans over the Course of the Covid-19 Pandemic,” *WTO*, 29 April 2020, https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/bdi_covid19_e.pdf (Diakses 29 September 2020).

pegawai yang sakit atau tidak dapat memenuhi standar kesehatan. Akibatnya, sumber makanan yang melibatkan banyak pihak dalam proses pengolahan tidak dapat menghasilkan secara maksimal dalam waktu yang sama dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Oleh sebab itu, bahan-bahan ini diprediksi dapat mengalami kekurangan stok akibat pandemi COVID-19.³³ Ketidakjelasan kapan krisis kesehatan yang disebabkan oleh COVID-19 akan berakhir turut berperan dalam pertimbangan pemerintah untuk memastikan stok makanan terpenuhi. Oleh sebab itu, pembatasan atau larangan ekspor menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menjaga jumlah pasokan makanan nasional.

Ada beberapa contoh negara-negara yang menerapkan pembatasan ekspor selama pandemi COVID-19. Contoh pertama adalah negara Rumania, yang memutuskan untuk melarang ekspor gandum, jagung, beras, bunga matahari, biji-bijian lain, minyak sayur, gula, serta produk roti selama pandemi COVID-19 masih berlangsung. Sebagai salah satu eksportir biji-bijian terbesar di Uni Eropa, upaya ini dilakukan oleh Rumania untuk melindungi persediaan pangan mereka selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, larangan ekspor bahan makanan juga diberlakukan oleh *Eurasian Economic Commission* (EAEU), yaitu badan pengawasan kawasan ekonomi Armenia-Belarus-Kazakhstan-Kyrgyzstan-dan Rusia. Komoditas yang dibatasi beragam seperti tepung, beras, gandum, dan lain-lain.³⁴ Kedua contoh tersebut hanya sebagian kecil dari total negara yang memberlakukan larangan atau pembatasan ekspor sejak pandemi COVID-19 terjadi.

Apabila contoh kasus ini dianalisis menggunakan *incidental protectionism*, maka larangan ekspor diberlakukan oleh negara-negara dengan memanfaatkan pandemi COVID-19 sebagai momentum untuk melegitimasi kebijakan ekonomi yang diambil. Sebelum pandemi COVID-19 muncul, negara-negara yang tergabung dalam WTO sepakat untuk tidak memperbolehkan adanya larangan ekspor-impor kecuali apabila larangan diberlakukan secara sementara dalam situasi yang “dapat mencegah terjadinya kelangkaan pada bahan pangan atau produk tertentu yang krusial bagi pihak yang bersangkutan.”³⁵ Artikel ini memberi ruang bagi anggota untuk memberlakukan pembatasan atau larangan bahan makanan selama bahan makanan tersebut dianggap “krusial” dan “rawan kelangkaan”. Kedua elemen tersebut merupakan contoh unsur non-perdagangan yang dimasukkan ke dalam persyaratan impor produk menurut konsep *incidental protectionism*. Ditambah lagi, salah satu persyaratan dari artikel XI adalah tidak diperbolehkan untuk menetapkan aturan yang bersifat diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi yang dilakukan oleh negara-negara dilakukan secara implisit.

B. Efek Samping dari Kebijakan Pembatasan dan Larangan Ekspor

a. Studi Kasus Kawasan Afrika

Berdasarkan prediksi dari *International Monetary Fund* (IMF), pandemi COVID-19 yang berpotensi menyebabkan resesi global sebesar 4% ini akan memengaruhi keadaan Afrika secara drastis. Keadaan ini diperkirakan dapat menjatuhkan GDP Afrika sebesar 1.4% terutama bagi negara-

³³ Alvaro Espitia, Nadia Rocha, dan Michele Ruta, “Covid-19 and Food Protectionism: The Impact of the Pandemic and Export Restrictions on World Food Markets,” *World Bank Group*, Mei 2020, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33800/COVID-19-and-Food-Protectionism-The-Impact-of-the-Pandemic-and-Export-Restrictions-on-World-Food-Markets.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Diakses 29 September 2020).

³⁴ Robyn Dixon, David L. Stern, dan Almaz Kumenov, “As borders harden during pandemic, some countries look to hold on to their own food,” https://www.washingtonpost.com/world/as-borders-harden-during-pandemic-some-countries-look-to-hold-onto-their-own-food/2020/04/08/385600e4-7459-11ea-ad9b-254ec99993bc_story.html

³⁵ GATT Artikel XI.2.

negara kecil dapat mencapai resesi hingga 7.8%.³⁶ Kondisi ini memaksa pemerintah di Afrika untuk mengurangi dana layanan publik untuk dialokasikan bagi isu ini. Penurunan signifikan ini merupakan hasil dari menurunnya jumlah ekspor bahan pangan global. Menurut model makro-ekonomi yang menganalisis dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Afrika, pengeksportir bahan makanan mentah dari Afrika akan merasakan dampak terburuk dari COVID-19.³⁷ Bahkan sebelum pandemi COVID-19, benua Afrika telah dilanda oleh isu ketahanan pangan. Hal ini kemudian diperparah dengan kondisi politik, sosio-ekonomi, dan lingkungan yang kerap terjadi di Benua Afrika. Dengan sedikitnya 60% populasi Afrika bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka dan akses ke makanan, setiap distorsi terkait perdagangan ke sektor ini dapat mengancam ketahanan pangan kaum miskin di benua itu.³⁸ Alhasil, *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) memperkirakan bahwa pendapatan publik di Afrika pun akan menurun hingga 5%.³⁹ Apa tidak segera ditanggulangi, maka hampir dipastikan akan menghambat proses Afrika menuju *Sustainable Development Goals* dan *Africa's Agenda 2063*.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, alasan pertama Benua Afrika menjadi salah satu yang paling terkena dampak dari kebijakan larangan ekspor selama COVID-19 adalah posisinya sebagai importir bahan makanan. Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan peran Afrika sebagai importir terhadap ketahanan pangan adalah teori dependensi. Saat ini, negara-negara di benua Afrika dikategorikan sebagai negara dependen, berdasarkan beberapa indikator seperti PDB, kondisi politik, serta kondisi sosioekonomi. Menurut Prebisch selaku salah satu tokoh teori dependensi, negara-negara dependen akan terus bergantung kepada negara dominan dan tidak akan pernah memiliki pendapatan yang lebih besar dari negara maju. Hal ini disebabkan oleh eksploitasi yang pernah atau masih dilakukan oleh negara dominan/maju terhadap negara dependen/berkembang. Saat ini, Benua Afrika masih dihantui oleh isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan, pertahanan keamanan, politik, dan perlambatan ekonomi. Hal ini membuat negara-negara rawan terhadap beragam isu, baik yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Dalam kasus kerawanan pangan, sebagian besar negara-negara di Afrika belum memiliki sistem pangan yang maju, sehingga tidak dapat menghasilkan bahan pangan yang layak untuk menjadi sumber ekspor atau bahkan dikonsumsi sendiri. Sebanyak hampir 40% bahan pangan yang diproduksi di Benua Afrika harus terbuang sia-sia akibat ketiadaan fasilitas dan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan bahan pangan.⁴⁰ Keadaan ini kemudian mengharuskan negara-negara di Afrika untuk melakukan impor demi mencukupi kebutuhan pangan mereka. Ketergantungan negara-negara di Afrika kepada ekspor dari negara lain membuat Afrika rentan terhadap krisis yang sewaktu-waktu dapat terjadi dalam dunia internasional.

Bentuk kausalitas dari posisi Afrika sebagai negara dependen diterapkan pada kasus kebijakan larangan ekspor yang diberlakukan selama COVID-19. Pada tahun 2016 hingga 2018, Afrika mengimpor sebesar 85% bahan makanan dari luar kontinen, bahkan diperkirakan jumlah impor akan mencapai \$110 miliar pada tahun 2025. Jumlah impor yang sangat besar ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan Afrika kepada pasar dunia dalam urusan pangan. Ketika terjadi disrupsi dalam sistem perpindahan pangan di dunia, maka Afrika akan menjadi salah satu kontinen yang

³⁶ Paul Akiwumi, "COVID-19: A threat to food security in Africa," 11 Agustus 2020, <https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2450> (Diakses 1 Oktober 2020).

³⁷ https://unctad.org/system/files/official-document/aldcmisc2020d3_en.pdf

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Isaac Bonuedi, Kofi Kamasa, dan Eric Evans, "Enabling trade across borders and food security in Africa," *Food Security* 12, 2020, hlm. 1121-1140, <https://link.springer.com/article/10.1007/s12571-020-01095-y>.

terkena imbas paling buruk. Hal ini dibuktikan dengan apa yang terjadi selama masa COVID-19. Di beberapa negara Afrika telah terjadi gangguan dalam aktivitas pemasaran dan perdagangan akibat stok makanan yang kian menipis akibat pembatasan ekspor-impor dari negara lain. Stok makanan yang menipis akibat larangan ekspor dan pembatasan transportasi kemudian mempersulit importir untuk mendapatkan sumber daya pangan yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan penduduk. Hal ini kemudian diperparah dengan *panic buying* akibat histeria COVID-19. Pada akhirnya, terjadi lonjakan harga pangan (terutama sereal) antara Maret dan Juni 2020.

Menurut *African Development Bank*, tantangan bagi Afrika pada masa pandemi dan pasca-pandemi ini adalah untuk mengidentifikasi area-area prioritas yang memerlukan percepatan transformasi sistem pangan yang lebih cepat.⁴¹ Selama pandemi COVID-19 negara-negara di Afrika kelimpungan mencari solusi demi memenuhi kebutuhan pangan mereka serta melindungi rantai pasokan makanan masing-masing. Misalnya, Kenya melakukan kebijakan pengurangan pajak pertambahan nilai untuk semua barang dari 16% menjadi 14%. Selain itu, Sudan juga memberlakukan larangan ekspor sorgum untuk memastikan ketersediaan domestik.⁴² Sayangnya, sebagian besar kebijakan yang dikeluarkan disinyalir hanya dapat mengatasi isu pangan dalam jangka pendek serta kurang efektif. Kebijakan larangan ekspor ditambah dengan *lockdown* dan larangan bepergian memberikan dampak negatif terutama bagi populasi yang paling rawan. Akibatnya, hingga saat ini masih ada 73 juta penduduk di Benua Afrika yang mengalami kerawanan pangan tinggi. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah hingga tahun 2021.⁴³

Berdasarkan pemaparan kondisi pangan Benua Afrika selama pandemi COVID-19, penulis menilai jika pembatasan ekspor terhadap bahan makanan tidak akan dapat menjadi solusi jangka panjang bagi permasalahan pangan di Benua Afrika. Pembatasan ekspor hanya ‘menyelesaikan’ krisis dalam jangka waktu tertentu saja. Ketergantungan pada larangan ekspor secara terus-menerus dapat menghalangi Afrika dalam melihat menyusun sistem penanggulangan krisis yang lebih baik dan berkelanjutan. Pendapat ini sejalan dengan rekomendasi dari *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) pun menyarankan pemerintah di negara Afrika untuk meniadakan pembatasan ekspor dan tarif impor serta hambatan perdagangan untuk non-tarif.⁴⁴ Agar dapat mengatasi dampak COVID-19 terhadap ketahanan pangan dalam jangka panjang, diperlukan pembangunan kapasitas di Afrika untuk memperkuat manajemen sumber daya makanan mereka. Hal ini sangat diperlukan oleh Afrika, tidak hanya untuk bertahan selama COVID-19 tetapi juga untuk mengatasi krisis pangan dan kemiskinan yang telah lama terjadi. Pemerintah Afrika perlu memastikan bahwa perpindahan barang, termasuk sumber pangan, dapat terjamin. Pandemi COVID-19 telah menggarisbawahi derajat keterkaitan antar negara, serta pentingnya mempertahankan rantai perdagangan untuk memastikan persediaan makanan tidak mengalami krisis.

Walaupun benua Afrika memiliki ketersediaan sumber daya yang sangat besar, mulai dari luas lahan yang subur hingga angkatan kerja muda yang terus bertambah, produksi pertanian tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini disebabkan oleh hambatan dari segi distribusi, akses, hingga tantangan keterjangkauan di benua tersebut. Oleh sebab itu, selain menjaga rantai

⁴¹ Jennifer Blanke, “Economic impact of COVID-19: Protecting Africa’s food systems from farm to fork,” *Brookings*, 19 Juni 2020, <https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/06/19/economic-impact-of-covid-19-protecting-african-food-systems-from-farm-to-fork/> (Diakses 1 Oktober 2020).

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ “COVID-19 and its impact on food security in the Near East and North Africa: How to respond?,” *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, <http://www.fao.org/3/ca8778en/CA8778EN.pdf> (Diakses 1 Oktober 2020).

perdagangan, negara-negara di Afrika juga perlu mengurangi ketergantungan mereka terhadap komoditas impor untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara diversifikasi komoditas pangan untuk mencegah ketergantungan pada sumber pangan tertentu.

b. Negara-negara lain dan Dinamika Perekonomian Global

Contoh pertama wilayah yang juga diprediksi rawan terhadap gangguan pangan selain Afrika adalah kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dengan populasi penduduk berpendapatan rendah dalam jumlah besar, ketimpangan infrastruktur, dan sumber daya pangan melimpah, kawasan ini menjadi rentan terhadap ketidakpastian politik yang disebabkan oleh pasokan bahan makanan.⁴⁵ Dari antara sekian sumber daya yang ada di kawasan ini, beras merupakan salah satu yang mengalami peningkatan dalam pembatasan dan larangan ekspor. Semakin banyak negara yang melakukan larangan atau pembatasan ekspor, maka semakin besar kemungkinan terjadinya gangguan pasokan makanan global. Kawasan ini secara kolektif menghasilkan dua per tiga ekspor beras dunia. Situasi pandemi COVID-19 yang tidak menentu dapat membuat negara-negara di kawasan ini melakukan pembatasan ekspor demi melindungi pasokan domestik.

Sampai dengan Juni 2020, data dari WHO dan *International Trade Center* (ITC), Myanmar, Viet Nam, Kamboja, dan Filipina pun telah memberlakukan larangan sementara untuk ekspor bahan makanan.⁴⁶ Pada awal pandemi COVID-19, Viet Nam selaku negara pengekspor beras ketiga terbesar di dunia, memberlakukan larangan ekspor komoditas beras. Setelah larangan ekspor beras diberlakukan oleh Viet Nam, terjadi peningkatan harga beras Thailand sebesar lebih dari 20%. Peningkatan ini juga disebabkan oleh pengurangan produksi beras Thailand secara besar-besaran akibat musim kemarau dan keterlambatan logistik. Selain itu, peningkatan harga juga disebabkan oleh keterlambatan dalam ekspor beras dari India. Setelah larangan tersebut diangkat, harga beras ikut menurun sebesar \$44 per ton dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Apabila larangan tetap diberlakukan, maka tidak menutup kemungkinan jika negara-negara importir beras akan terkena dampak negatif dari segi persediaan beras maupun ekonomi. Hal ini merujuk kepada kondisi delapan dari sepuluh negara anggota ASEAN yang bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan makanan domestiknya.⁴⁷

Walaupun kebijakan pembatasan ekspor dapat dijustifikasi untuk menahan persebaran virus dalam jangka pendek, jika tetap diberlangsungkan, maka akan menghancurkan negara-negara yang lemah di sektor perekonomian. Ratusan juta manusia, terutama di negara berkembang, bergantung pada beras sebagai sumber pendapatan. Meningkatnya harga beras dapat membatasi akses orang-orang tersebut terhadap pangan yang layak.⁴⁸ Oleh sebab itu, pada 15 April 2020, para Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari negara-negara ASEAN berkumpul untuk mengeluarkan pernyataan yang

⁴⁵ Peter Mumford, "Pandemic raises risk of food shortages in South and Southeast Asia," *Eurasia*, 23 April 2020, <https://www.eurasiagroup.net/live-post/pandemic-raises-risk-food-shortages-south-and-southeast-asia> (Diakses 30 September 2020).

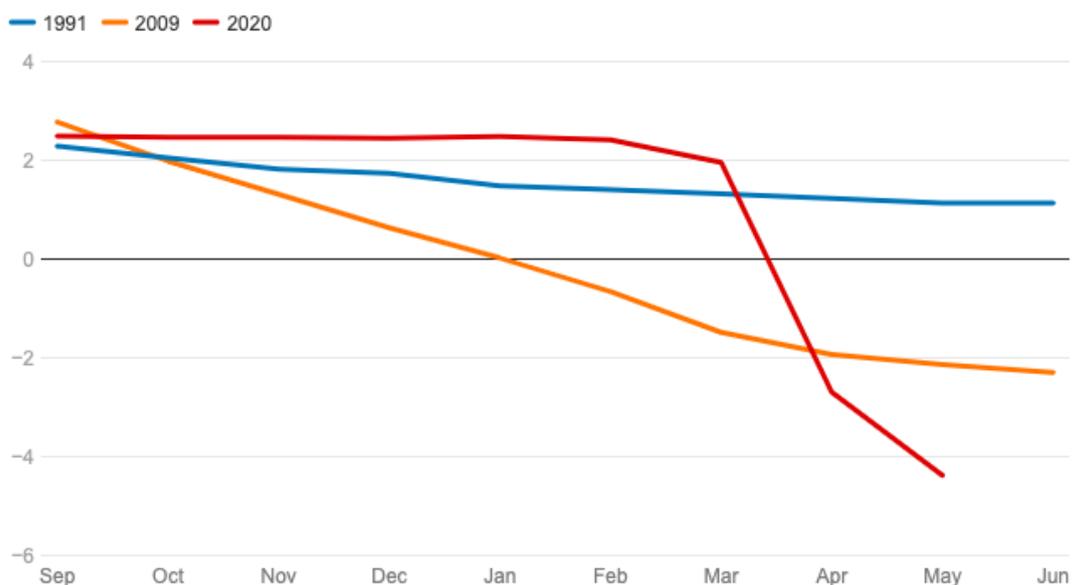
⁴⁶ Alexander C. Chandra, Irfan Mujahid, dan Ruth K. Mahyassari, "Trade Measures in the Time of COVID-19: The Case of ASEAN," *ASEAN Policy Brief*, Juli 2020, https://asean.org/storage/2020/07/ASEAN-Policy-Brief-3_FINAL_.pdf, hal. 4.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 8.

⁴⁸ "Why export restrictions should not be a response to COVID-19: Learning lessons from experience with rice in Asia and the Pacific," *Food and Agriculture Organization of the United Nations*, 1 Juni 2020, <http://www.fao.org/3/ca9362en/ca9362en.pdf> (Diakses 30 September 2020).

menggarisbawahi perlunya menjaga jalur pasokan pangan regional tetap terbuka dan mengurangi penggunaan langkah-langkah pengendalian ekspor.⁴⁹

Berdasarkan hasil penelitian *World Bank*, banyak negara berkembang yang sudah mengalami pandemi ini telah membawa sebagian besar negara ke dalam resesi perekonomian dengan pendapatan per kapita yang semakin menyusut. Bahkan, pendapatan negara maju pun diproyeksikan menyusut hingga 7 persen. Kondisi ini semakin mempersulit negara berkembang yang harus mengatasi wabah virusnya sendiri. Diperkirakan, prospek pasar negara berkembang akan ikut mengalami kontraksi perekonomian sebesar 2,5 persen. Selain itu, setiap wilayah pun akan mengalami penurunan pertumbuhan secara signifikan.



Grafik 2. Perbandingan Tiga Masa Resesi Global Dunia Pasca 1990
Sumber: World Bank, 2020

Grafik di atas berupaya untuk membandingkan proyeksi pertumbuhan perekonomian global pada 3 (tiga) saat di mana dunia mengalami resesi perekonomian secara global, yakni tahun 1991 (garis biru), tahun 2009 (garis oranye), dan tahun 2020 (garis merah). Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa resesi global akibat COVID-19 memiliki tingkat penurunan yang paling cepat dan tajam di antara semua resesi global sejak tahun 1990. Pada April 2020, *International Monetary Funds* (IMF) memprediksikan bahwa perekonomian dunia di tahun 2020 akan menyusut hingga 2%. Akan tetapi, pada Juni 2020, IMF menyatakan bahwa penurunannya ternyata lebih parah dari yang telah diprediksikan, yakni mencapai 5% atau senilai US\$ 12 triliun. Di antaranya, hanya Tiongkok yang diprediksikan akan tetap mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif, walau hanya 1% untuk tahun 2020. Sementara bagi sejumlah negara Eropa Barat, termasuk Inggris dan Prancis, diproyeksikan akan

⁴⁹ Francesco Alberti, "ASEAN Trade Measures And COVID-19," *The ASEAN Post*, 18 Juli 2020, <https://theaseanpost.com/article/asean-trade-measures-and-covid-19> (Diakses 1 Oktober 2020).

mengalami penyusutan hingga lebih dari 10%.⁵⁰ Menanggapi pembatasan dan larangan ekspor ini, IMF pun menyatakan bahwa hambatan perdagangan merupakan tindakan yang tidak efektif dalam mengurangi ketimpangan.

C. Masa Depan Kebijakan Pembatasan dan Larangan Ekspor

Menurut prediksi dari WTO, pembatasan atau larangan ekspor yang dilakukan oleh beberapa negara akan memberikan dampak positif yang bersifat sementara saja. Dalam jangka panjang, pembatasan ekspor dapat memberikan efek negatif bagi eksportir maupun importir. Ketika negara melakukan larangan atau pembatasan ekspor, harga bahan makanan domestik akan mengalami kenaikan, yang kemudian ikut mempengaruhi harga di pasar global. Perubahan harga yang disebabkan oleh larangan ekspor umumnya bergantung pada seberapa besar konsentrasi impor dari negara-negara yang paling terkena dampak dari COVID-19, serta elastisitas permintaan ekspor. Diperkirakan bahwa ekspor yang lebih rendah akan mengakibatkan kenaikan harga sebesar empat kali lipat.⁵¹ Harga yang meningkat dan persediaan yang tidak mencukupi akan memberi dampak negatif terutama kepada negara-negara importir dengan kapasitas ekonomi yang rendah.⁵²

Apabila dilihat dari sisi eksportir maupun importir, tindakan proteksionisme yang dilakukan oleh negara-negara telah mengancam ketahanan pangan mereka. Negara-negara importir perlu menetapkan kebijakan-kebijakan domestik yang mampu mempertahankan kebutuhan masyarakatnya. Ini juga menjadi bukti bahwa pandemi COVID-19 merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara tidak hanya bagi importir, tetapi juga eksportir. Negara eksportir memiliki kepentingan nasional untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya, baik dari segi ekonomi maupun sosial, terutama terkait dengan kebutuhan pangan. Selain itu, ketakutan akan kelangkaan pangan menghasilkan adanya peningkatan permintaan. Berdasarkan grafik di bawah, terlihat bahwa banyak negara mengalami peningkatan harga nasi dengan sangat drastis.⁵³

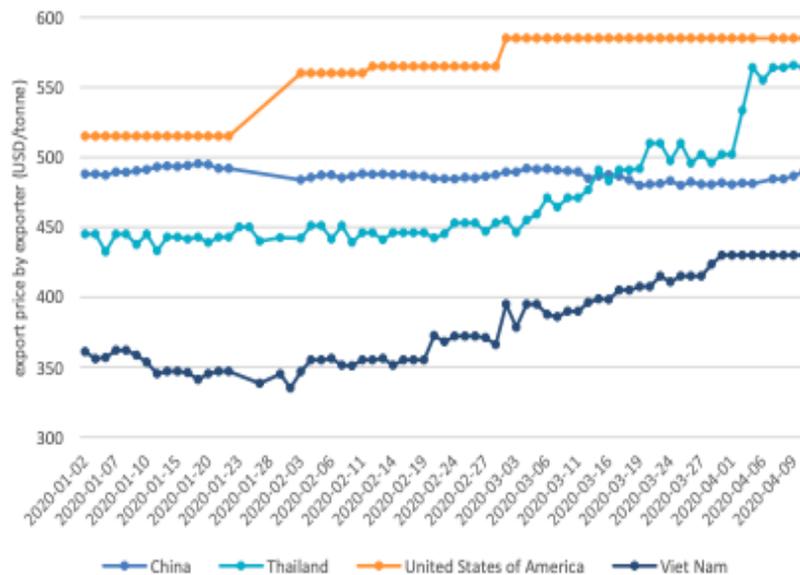
⁵⁰ “Krisis ekonomi akibat Covid-19: IMF perkiraan ‘luka ekonomi’ karena krisis global akibat pandemic virus corona lebih buruk dari perkiraan,” *BBC News*, 25 Juni 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53168814> (Diakses 26 September 2020).

⁵¹ Alvaro Espitia, Nadia Rocha, dan Michele Ruta, “Covid-19 and Food Protectionism: The Impact of the Pandemic and Export Restrictions on World Food Markets,” *World Bank Group*, Mei 2020, <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33800/COVID-19-and-Food-Protectionism-The-Impact-of-the-Pandemic-and-Export-Restrictions-on-World-Food-Markets.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Diakses 29 September 2020).

⁵² “Export Controls and Export Bans over the Course of the Covid-19 Pandemic,” *WTO*, 29 April 2020, https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/bdi_covid19_e.pdf (Diakses 29 September 2020).

⁵³ Alvaro Espitia, Nadia Rocha, Michele Ruta, “Covid-19 and Food Protectionism: The Impact of the Pandemic and Export Restrictions on World Food Markets,” *World Bank*, May 2020, <http://documents1.worldbank.org/curated/en/417171589912076742/pdf/Covid-19-and-Food-Protectionism-The-Impact-of-the-Pandemic-and-Export-Restrictions-on-World-Food-Markets.pdf> (Diakses 2 Oktober 2020).

Grafik 1. Perbandingan Kenaikan Harga Nasi di Beberapa Negara



Sumber: WTO, 2020

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan dan larangan ekspor bahan pangan didasari oleh kepentingan nasional untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik. Di tengah situasi global yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19, negara-negara memilih untuk kembali menerapkan proteksionisme perdagangan agar dapat menjaga kesejahteraan negaranya masing-masing. Dalam situasi ini, negara-negara pengekspor lebih diuntungkan dari kondisi sumber daya alam yang strategis. Bagi negara-negara pengekspor, risiko terjadinya resesi ekonomi global menjadi pertimbangan sekunder, sedangkan memenuhi kepentingan pribadi menjadi prioritas utama.

Di sisi lain, negara-negara yang sangat bergantung pada impor bahan makanan harus merasakan imbas negatif dari kebijakan larangan ekspor. Salah satu contoh kontinen yang paling dirugikan oleh kebijakan ini adalah Benua Afrika. Selaku salah satu kontinen importir bahan makanan terbesar, larangan ekspor akan memberi dampak terhadap ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara di Afrika apabila terus diberlakukan. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa pembatasan perdagangan tidak dapat digunakan sebagai solusi jangka panjang terhadap isu kekurangan pasokan karena dapat menimbulkan efek domino yang pada akhirnya dapat merugikan negara pengekspor maupun pengimpor. Tindakan kebijakan perdagangan yang tidak kooperatif berisiko memperbesar gangguan di pasar pangan global, sehingga dapat menyebabkan lonjakan harga pangan dunia yang lebih besar. Pada akhirnya, larangan ekspor hanya dapat dilakukan dengan sementara dan sebatas memenuhi kebutuhan pangan internal. Dalam jangka panjang, diperlukan

kebijakan yang mampu memberikan efek positif terhadap perekonomian global. Hal ini dapat dimulai dengan pengadopsian kebijakan perdagangan yang lebih terbuka untuk semakin memperbaiki ketahanan pangan dunia.

Referensi

Buku

Bonuedi, Isaac, Kofi Kamasa, dan Eric Evans. "Enabling trade across borders and food security in Africa." *Food Security* 12. 2020. hlm. 1121-1140. <https://link.springer.com/article/10.1007/s12571-020-01095-y>.

Burchill, Scott. *The National Interest in International Relations Theory*. (New York: Palgrave Macmillan) hal. 35-36.

Dunkley, Graham. *Free Trade : Myth, Reality, and Alternatives*. (New York: Palgrave Macmillan. 2004) hal. 3.

Ferraro, Vincent. "Dependency Theory: An Introduction." in *The Development Economics Reader*. Ed. Giorgio Secondi (London: Routledge, 2008), hlm. 58-64.

Frankel, J. 1979. *International Relations in a Changing World* (Oxford. 1979). hal. 85-86.

Levy, Philip I. "Imaginative Obstruction: Modern Protectionism in the Global Economy." *Georgetown Journal of International Affairs*. 2009. Summer/Fall: 7-14.

Morgenthau, Hans J. 1952. "Another 'Great Debate': The National Interest of the United States." *The American Political Science Review*, XLVI, hal. 972.

Morgenthau, Hans J. 2006. *Politics Among Nations* (New York: Alfred A. Knopf) hal. 145.

Plano, Jack C. dan Ray Olton. *The International Relations Dictionary: Third Edition*. (California: AB-Clio. 1980) hal. 27.

Salvatore, Dominick. "Protectionism and World Welfare: Introduction," dalam *Protectionism and World Welfare*, ed. Dominick Salvatore (Cambridge : Cambridge University Press. 2003) hal. 2.

Jurnal

"A shock to the food system: Lessons Learned from the COVID-19 pandemic."

Deloitte. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/br/Documents/consumer-business/Deloitte-Covid-19-shock-to-the-food-system.pdf>, hal. 4. (Diakses 24 September 2020).

"COVID-19 and Export Restrictions: the Limits of International Trade Law and Lessons for the AfCFTA." *United Nations Economic Commission for Africa*. https://www.uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/atpc_brief-covid-19_export_restrictions-legal-analysis_eng_final1.pdf. hal. 3.

- “COVID-19 and its impact on food security in the Near East and North Africa: How to respond?.” *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. <http://www.fao.org/3/ca8778en/CA8778EN.pdf> (Diakses 1 Oktober 2020).
- “Export Controls and Export Bans over the Course of the Covid-19 Pandemic.” *WTO*. 29 April 2020. https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/bdi_covid19_e.pdf (Diakses 29 September 2020).
- “Export Prohibitions and Restrictions: Information Note.” *World Trade Organization*. 23 April 2020. https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/export_prohibitions_report_e.pdf (Diakses 26 September 2020).
- “Export Restrictions in Response to the COVID-19 Pandemic.” *Congressional Research Service*. 25 Agustus 2020. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11551> (Diakses 28 September 2020).
- “Why export restrictions should not be a response to COVID-19: Learning lessons from experience with rice in Asia and the Pacific.” *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. 1 Juni 2020. <http://www.fao.org/3/ca9362en/ca9362en.pdf> (Diakses 30 September 2020).
- Chandra, Alexander C., Irfran Mujahid, dan Ruth K. Mahyassari. “Trade Measures in the Time of COVID-19: The Case of ASEAN.” *ASEAN Policy Brief*. Juli 2020. https://asean.org/storage/2020/07/ASEAN-Policy-Brief-3_FINAL_.pdf, hal. 4-8.
- Espitia, Alvaro, Nadia Rocha, dan Michele Ruta. “COVID-19 and Food Protectionism: The Impact of the Pandemic and Export Restrictions on World Food Markets.” *World Bank*. Mei 2020. <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33800/COVID-19-and-Food-Protectionism-The-Impact-of-the-Pandemic-and-Export-Restrictions-on-World-Food-Markets.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Diakses 26 September 2020).
- Hepburn, Jonathan, David Laborde, Marie Parent, dan Carin Smaller. “COVID-19 and Food Export Restrictions: Comparing today’s situation to the 2007/08 price spikes.” *International Institute for Sustainable Development*. <https://www.iisd.org/system/files/2020-08/COVID-19-food-export-restrictions.pdf> (Diakses 29 September 2020).
- Kiyono, Ken. “A Study on the Concept of The National Interest of Hans J. Morgenthau: As The Standard of American Foreign Policy.” http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp/dspace/bitstream/10069/27783/1/keieikeizai49_03_04.pdf (Diakses 14 Agustus 2019).

Liu, Zongyi. 2014. "The Concept of National Interests." *China's Diplomacy*. hal. 121-189.

Situs Daring

"Europe lockdown: New coronavirus rules country-by-country." *BBC News*. 10 Oktober 2020.
<https://www.bbc.com/news/explainers-53640249> (Diakses 10 Oktober 2020).

"Germany bans export of medical protection gear due to coronavirus." *Reuters*. 4 Maret 2020.
<https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-germany-exports-idUSL8N2AX3D9>
(Diakses 1 Oktober 2020).

"Krisis ekonomi akibat Covid-19: IMF perkirakan 'luka ekonomi' karena krisis global akibat pandemi virus corona lebih buruk dari perkiraan." *BBC News*. 25 Juni 2020.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53168814> (Diakses 26 September 2020).

"Trade Interdependencies in COVID-19 Goods." *OECD*. 5 Mei 2020.
<https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/trade-interdependencies-in-COVID-19-goods-79aaa1d6/> (Diakses 1 Oktober 2020).

"Wuhan market had role in virus outbreak, but more research needed, WHO says." *CNBC*. 8 Mei 2020.
<https://www.cnn.com/2020/05/08/who-wuhan-market-had-role-in-coronavirus-outbreak-more-research-needed.html> (Diakses 22 September 2020).

Akiwumi, Paul. "COVID-19: A threat to food security in Africa." 11 Agustus 2020.
<https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2450> (Diakses 1 Oktober 2020).

Alberti, Francesco. "ASEAN Trade Measures And COVID-19." *The ASEAN Post*. 18 Juli 2020.
<https://theaseanpost.com/article/asean-trade-measures-and-covid-19> (Diakses 1 Oktober 2020).

Blanke, Jennifer. "Economic impact of COVID-19: Protecting Africa's food systems from farm to fork." *Brookings*. 19 Juni 2020. <https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2020/06/19/economic-impact-of-covid-19-protecting-africas-food-systems-from-farm-to-fork/> (Diakses 1 Oktober 2020).

Cakti, Aji. "Indef: Covid-19 bisa mendorong negara-negara ke era proteksionisme." *Antaranews*. 8 April 2020. <https://www.antaranews.com/berita/1412142/indef-COVID-19-bisa-mendorong-negara-negara-ke-era-proteksionisme> (Diakses 30 September 2020).

Dependency theory, *Economics Online*,

https://www.economicsonline.co.uk/Global_economics/Dependency_theory.html (Diakses 30 November 2020).

Dixon, Robyn, David L. Stern, dan Almaz Kumenov. "As borders harden during pandemic, some countries look to hold on to their own food." https://www.washingtonpost.com/world/as-borders-harden-during-pandemic-some-countries-look-to-hold-onto-their-own-food/2020/04/08/385600e4-7459-11ea-ad9b-254ec99993bc_story.html.

Ducharme, Jamie. "World Health Organization Declares COVID-19 a 'Pandemic.' Here's What That Means." *TIME*. 11 Maret 2020. <https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/> (Diakses 20 September 2020).

Limenta, Michelle. "Rising export protectionism in time of global isolation." *The Jakarta Pos*. 28 April 2020. <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/04/28/rising-export-protectionism-in-time-of-global-isolation.html> (Diakses 1 Oktober 2020).

Mumford, Peter. "Pandemic raises risk of food shortages in South and Southeast Asia." *Eurasia*. 23 April 2020. <https://www.eurasiagroup.net/live-post/pandemic-raises-risk-food-shortages-south-and-southeast-asia> (Diakses 30 September 2020).

Pop, Valentina. "Protectionism Spreads Globally With the New Coronavirus." *WSJ*. 29 Mei 2020. <https://www.wsj.com/articles/protectionism-spreads-globally-with-the-new-coronavirus-11590779442> (Diakses 1 Oktober 2020).

Refaat, Taarek. "Some 85 Countries Request IMF's Assistance to Battle Pandemic." *See*. 1 April 2020. <https://see.news/some-85-countries-request-imfs-assistance-to-battle-pandemic/> (Diakses 29 September 2020).

WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. <https://covid19.who.int/> (Diakses 6 Oktober 2020).